

Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok

Lufia Anggis Guciano, Syamsir
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: Syamsir
E-mail: syamsirsaili@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif serta pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik manual data analysis procedure (MDAP) yaitu dengan membuat catatan harian, transkrip, koding, kategorisasi, tema dan memos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok sudah terlaksana dan berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang ditemui pada proses terlaksananya program gerakan keamanan pangan desa tersebut. Kendala yang ditemui yaitu rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pangan yang aman, fasilitas yang belum mencukupi serta sumber daya manusia yang kurang memadai. Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu melaksanakan kegiatan kampanye, menambah sumber daya manusia serta menambah fasilitas penunjang kegiatan program.

Kata Kunci: *implementasi program, gerakan keamanan pangan desa, pemberdayaan masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Village Food Safety Movement program in community empowerment in Nagari Paninggahan, Solok Regency. This research uses descriptive qualitative method and selection of informants using purposive sampling techniques. Data collection is carried out by means of interviews, observations and documentation. Test the validity of the data using source triangulation techniques and methods. Data analysis techniques use manual data analysis procedures (MDAP) namely by making daily notes, transkrip, coding, categorization, themes and memos. The results showed that the implementation of the village food safety movement program in community empowerment in Nagari Paninggahan Solok Regency has been carried out and is running quite well but is not fully optimal. This can be seen from the existence of several obstacles encountered in the process of implementing the village food safety movement program. The obstacle encountered is the low economic level of the community, lack of public knowledge regarding safe food, inadequate facilities and inadequate human resources. Meanwhile the efforts made to overcome obstacles are to carry

out campaign activities, adding human resources and adding supporting facilities for program activities.

Keywords: *implementation program, village food safety movement, community empowerment*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

Received: Agt 13 2022

Revised: Agt 17 2022

Accepted: Agt 23 2022

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor `18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwasanya keamanan pangan merupakan keadaan dan usaha yang digunakan dalam menahan pangan agar tidak tercemar dari kemungkinan zat biologis, kimia serta benda lainnya yang dapat merugikan, mengganggu dan mengancam kesehatan manusia yang sesuai akan agama, ketentuan serta budaya dari masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan tujuan dilaksanakannya keamanan pangan yaitu supaya negara dapat melindungi seluruh rakyat dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa rakyat dalam mengonsumsi pangan (PP RI No 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan).

Permasalahan mengenai keamanan pangan khususnya pemakaian zat kimia berbahaya dalam bahan pangan hingga kini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Terdapat 4 masalah pokok dalam keamanan pangan di Indonesia, yaitu masih banyak didapati produk pangan yang tidak mencukupi kriteria kesehatan dalam peredaran, banyaknya masalah penyakit serta keracunan pangan yang belum diketahui asalnya, masih banyak didapati sarana pembuatan dan penyaluran pangan tidak mencukupi kriteria izin edar seperti pada industri

rumah tangga, jasa boga dan penjual jajanan makanan,serta minimnya wawasan dan kepedulian masyarakat terkait keamanan pangan (LSM Spada Indonesia, 2020).

Oleh karena itu, pada tahun 2014 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi suatu program nasional yaitu Program Gerakan Keamanan Pangan Desa. Gerakan Keamanan Pangan Desa atau GKPD merupakan suatu gerakan berbasis komunitas dalam melaksanakan keamanan pangan sampai kepada tingkat perseorangan dan mengikut sertakan semua komponen desa (Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman).

Menurut Mardikanto & Soebiato (2013: 30) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam menaikkan taraf hidup masyarakat yang kini dalam keadaan tidak mampu agar dapat membebaskan diri dari kemiskinan serta keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan upaya memandirikan masyarakat. Pada tahun 2019 BPOM Padang mengintervensi Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan program GKPD di empat Nagari yaitu Nagari Dilam di Kecamatan Bukit Sundi, Nagari Jawi-Jawi di Kecamatan

Gunung Talang, Nagari Koto Sani di Kecamatan X Koto Singkarak serta Nagari Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih. Program ini merupakan upaya dalam menjaga keamanan pangan yang ada di daerah tersebut aman dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh masyarakat.

Nagari Paninggahan merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok yang melaksanakan Program GKPD dalam rangka pemberdayaan masyarakat Nagari Paninggahan dalam bidang bina manusia. Bina manusia adalah usaha awal dan terpenting yang harus diperhatikan pada semua proses dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut didasari dengan pandangan bahwasanya arah dari pembangunan yaitu agar memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat (*sumber: Kantor Wali Nagari Paninggahan Kabupaten Solok, 2022*).

Pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan ini diatur dalam Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan Nomor 32/KPTS/WN-PNG/2020) Tentang Penetapan Kader Keamanan Pangan Desa Nagari Paninggahan, menetapkan kader keamanan pangan Nagari Paninggahan yang bertugas memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan. Sedangkan dalam melaksanakan program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan ini merupakan tanggung jawab dari Bapak H. Yoserizal, S.Ag selaku Wali Nagari sekaligus tim keamanan pangan Nagari.

Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang muncul

yaitu *Pertama*, Sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat Nagari terhadap pentingnya keamanan pangan masih rendah serta rendahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan yang aman. *Kedua*, kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat Nagari Paninggahan terhadap keamanan pangan yang sesuai akan pesan 5 kunci keamanan pangan. *Ketiga*, kurang disiplin para kader keamanan pangan dalam melaksanakan program gerakan keamanan pangan desa sehingga mengakibatkan program tersebut berjalan tidak sesuai akan rencana yang sudah ditetapkan bersama. *Keempat*, adanya beberapa kader keamanan pangan Nagari Paninggahan yang pasif sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai kader keamanan pangan nagari.

Permasalahan di atas telah banyak mempengaruhi upaya Pemerintah Nagari Paninggahan dalam mengimplementasikan program gerakan keamanan pangan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mendalami dan melaksanakan penelitian dengan harapan terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok dapat berjalan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik *manual data analysis procedure* (MDAP) yaitu dengan membuat catatan harian, koding, tema, kategorisasi serta memo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dalam pemberdayaan masyarakat

Untuk mendeskripsikan implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan, peneliti berpedoman pada teori implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Edward III dalam (Dwiyanto, 2009: 31-33), terdapat 4 aspek yang berpengaruh dalam teori ini, yaitu:

1. Komunikasi

Edward III dalam (Dwiyanto, 2009) menyatakan bahwa komunikasi mengacu kepada semua kebijakan mampu dijalankan sebagaimana mestinya apabila terlaksana komunikasi yang efektif diantara pelaksana program maupun kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*).

Pada aspek komunikasi dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh para tim keamanan pangan nagari, kader keamanan pangan nagari dan kader kesehatan nagari kepada masyarakat terkait program gerakan keamanan pangan desa. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat

berjalan dengan lancar, masyarakat yang sudah diintervensipun mengetahui tujuan dilaksanakannya program tersebut serta penyampaian informasi yang cukup jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh para kader keamanan pangan Nagari Paninggahan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam (Dwiyanto, 2009) menyatakan bahwa sumber daya mengacu kepada semua kebijakan seharusnya ditunjang oleh sumber daya yang mencukupi yaitu sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial. Pada aspek sumber daya dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan masih belum memenuhi. Hal ini dilihat dari kurangnya pelaksana program yaitu para kader keamanan pangan nagari dan kader kesehatan nagari serta anggaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa ini terbilang hanya pas-pasan saja. Sehingga implementasi program ini berjalan secara tidak optimal.

3. Disposisi

Edward III dalam (Dwiyanto, 2009) menyatakan bahwa disposisi merupakan sifat dan kepribadian yang ada pada pelaksana kebijakan seperti komitmen, kesungguhan serta demokratis. Disposisi ini diartikan sebagai perilaku dari para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah program ataupun kebijakan. Pada aspek disposisi dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan sudah baik. Hal ini dilihat dari sikap, kemauan dan kesungguhan dari para pelaksana dalam menjalankan

program. Para pelaksana program ini yaitu tim keamanan pangan nagari dan kader keamanan pangan nagari memiliki komitmen dan antusias yang tinggi serta sepenuhnya mendukung program gerakan keamanan pangan desa ini di Nagari Paninggahan. Hal ini bertujuan agar terciptanya keamanan pangan pada masyarakat Nagari Paninggahan

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam (Dwiyanto, 2009) menyatakan bahwa struktur birokrasi merupakan aspek penting pada implementasi kebijakan, aspek ini meliputi mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok serta struktur organisasi dari implementor kebijakan. Pada aspek struktur birokrasi dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari kejelasan pembagian tugas masing-masing yang secara bertanggung jawab dari pelaksana program tersebut yang dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program yaitu tim keamanan pangan nagari, kader keamanan pangan nagari dan kader kesehatan nagari mempunyai tugas serta tanggung jawab yang jelas dan berbeda-beda sesuai akan pembagian tugas diantara pelaksana kegiatan program.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa

Dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan tidak selalu terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala yang ditemui sehingga

menghambat jalannya pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa ini. Menurut Goldratt dalam (Haksama dan Larasati, 2016) kendala merupakan segala sesuatu yang membatasi sistem organisasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Pasolong (2010: 59) membagi kendala menjadi 2 jenis yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

Kendala eksternal merupakan segenap kemampuan yang memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada proses implementasi tersebut. Hasil dari temuan penelitian terdapat beberapa kendala eksternal yang dihadapi dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa, yaitu:

- Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan seadanya saja, tanpa memperhatikan bagaimana tingkat keamanan dan kualitas pangan tersebut. Sehingga keadaan ekonomi masyarakat tidak mendukung dalam memenuhi bahan pangan yang lebih berkualitas.

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pangan yang aman

Keterbatasannya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Paninggahan terhadap indikator pangan yang aman, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana kriteria pangan yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penerapan program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan.

Kemudian kendala internal merupakan kesiapan dan kualitas input yang dimiliki dalam sebuah proses implementasi. Dari temuan penelitian terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan, yaitu:

- Fasilitas yang kurang memadai

Keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak nagari seperti alat uji sampel makanan yaitu rapid test kit, menyebabkan pelaksanaan kegiatan program keamanan pangan desa ini tidak berjalan dengan lancar.

- Sumber daya manusia yang belum memadai

Pada implementasi program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan belum ditunjang dengan sumber daya manusia yang mencukupi pada proses terlaksananya program tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kader keamanan pangan nagari yang tidak aktif lagi serta rendahnya tingkat kedisiplinan dari para kader keamanan pangan dalam melaksanakan tugasnya.

Upaya mengatasi kendala dalam Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa

Menurut Sunggono dalam (Sumpeno, 2020) upaya dalam mengatasi hambatan dari suatu implementasi kebijakan maupun program mencakup beberapa cara yaitu (1) Tersedianya sumber daya yang mencukupi baik itu sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ataupun fasilitas berupa sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan dari suatu kebijakan; (2) Ketaatan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan juga mempengaruhi

dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila perilaku masyarakat yang sadar terhadap pentingnya program yang dilaksanakan, hal ini dapat mencapai salah satu tujuan dari dilaksanakannya program tersebut.

Hasil dari temuan penelitian terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala pada implementasi program gerakan keamanan pangan desa yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan kampanye

Pihak nagari bekerja sama dengan para kader keamanan pangan nagari dan kader kesehatan nagari untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye dilakukan dengan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangan kepada masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan.

2. Menambah sumberdaya manusia

Melakukan penambahan sumber daya manusia dengan cara menambah jumlah kader keamanan pangan nagari agar dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat dalam menerapkan keamanan pangan pada rumah tangganya masing-masing.

3. Menambah fasilitas penunjang

Pihak nagari mengupayakan dalam hal penambahan alat keamanan pangan berupa pembelian rapid test kit serta para kader keamanan pangan nagari mengupayakan dalam pembuatan sarana seperti stiker, baliho, poster dan celemek masak dari bahan plastik bekas kemudian dibagikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa imeplementasi program

gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok sudah terlaksana dan berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kendala yang ditemui dalam proses terlaksananya program gerakan keamanan pangan desa tersebut.

Kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok yaitu rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pangan yang aman, dan fasilitas yang kurang memadai, serta sumber daya manusia yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan yaitu dengan melaksanakan kegiatan kampanye, menambah sumberdaya manusia, dan menambah fasilitas penunjang kegiatan program.

DAFTAR PUSTAKA

Haksama, Setya & Selviana Putri Larasati. 2016. Penerapan Theory Of Constraint pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. Vol 4. No 2. Hal 155-162

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

LSM Spada Indonesia (2020, 30 Juli). Masalah Keamanan Pangan

from

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/page/view.php?id=72863>

- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Sumpeno, Triyono. 2020. Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol 7. No 1. April 2020.
- Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan Nomor 32/KPTS/WN-PNG/2020 Tentang Penetapan Kader Keamanan Pangan Desa Nagari Paninggahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan